

PERAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM DALAM PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS PADA TAHUN 2017-2019

Arman Jalizar¹, Kustiawan², Yudhanto Satyagraha Adiputra³,

armanjalizar@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Services in Batam City are not going well, one of which is related to the handling of homeless people and beggars who are mushrooming in every corner of Batam City, especially in Nagoya and Batam center which are the mobility centers of Batam City itself. Many immigrants from outside the Batam city area are trying to make a fortune in Batam city, but without being equipped with sufficient education, skills and experience to face the competition. This lack of education, skills, and experience to live life in the city of Batam has become an opportunity for the increase in homeless and beggars in the city of Batam. . The research method used is qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques are through observation, interviews, and documentation. The unit of analysis in this research is the Department of Social Affairs and Community Empowerment of Batam City and the Nilam Suri Rehabilitation Building. The results of this study obtained by the authors indicate that the role played by the Batam city government through the Social Service in controlling beggars and homeless people is still not enough to control the homeless and beggars still lack of training provided and carried out by the Batam City Social and Empowerment Service. and some changes are needed, both from a number of factors, both in terms of training and changes in applicable regulations to become more effective and efficient, in terms of training, capital, supervision, education, and also changes to regulations for homeless people and beggars in the city of Batam.

Keywords: Homeless and Beggars, Roles, Social Service and Empowerment.

I. Pendahuluan

Batam adalah salah satu kota yang memiliki jumlah gelandangan dan pengemis yang banyak, padahal kota ini sendiri adalah kota yang sangat berpotensi baik dibidang ekonomi, pariwisata, dan tujuan investasi di Indonesia karena mengingat letaknya yang sangat strategis dan berbatasan langsung dengan singapura dan malaysia, dengan cita-cita Kota Batam untuk dapat mengimbangi Singapura dan Johor Malaysia, sangat disayangkan jika manajemen pelayanan di Kota Batam tidak berjalan dengan baik, salah satunya adalah terkait penanganan gelandangan dan pengemis yang menjamur di setiap sudut Kota Batam terutama di Nagoya dan Batam center yang menjadi pusat mobilitas Kota Batam itu sendiri.

Kota Batam sendiri memiliki daya tarik bagi masyarakat Indonesia baik itu dari pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan maupun Sulawesi dan Papua. Adapun alasan atau daya tarik yang membuat mereka datang atau hijrah bertempat tinggal ke Kota Batam antara lain:

1. Kehidupan Kota Batam yang lebih modern, mewah dan letaknya yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia.
2. Sarana dan prasarana Kota Batam yang lebih lengkap.
3. Banyaknya lapangan pekerjaan yang dibuka tiap tahunnya di Kota Batam serta UMK yang tinggi.

Hal-hal ini yang membuat mereka datang ke Kota Batam, mereka berharap akan memperbaiki hidup mereka jika mereka berpindah ke Kota Batam maka impian untuk menjadi orang sukses juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan urbanisasi, karena perkotaanlah yang memberikan peluang cukup besar untuk mewujudkan impiannya itu serta mengadu nasib di kota ini. Kota Batam merupakan salah satu Kota tujuan bagi orang-orang yang ingin merubah taraf kehidupan yang lebih baik. Hal ini bisa kita pahami karena Kota Batam merupakan pusat pemerintahan, pusat industri, pusat perdagangan baik barang maupun jasa.

Kondisi ekonomi Kota Batam yang terus meningkat sehingga banyak para investor yang membuka lapangan pekerjaan di Kota Batam karena hal tersebut banyak pendatang dari luar daerah Kota Batam yang mencoba mencari peruntungan di Kota Batam, tetapi tanpa dibekali dengan pendidikan, kecakapan serta pengalaman yang cukup untuk menghadapi persaingan. Kurangnya pendidikan, kecakapan, dan pengalaman untuk menjalani kehidupan di Kota Batam inilah yang menjadi peluang meningkatnya gelandangan dan pengemis di Kota Batam.

Hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang berlibur di Kota Batam. Padahal menurut data yang dilampirkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Kepulauan Riau, mencatat jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Batam sepanjang Januari hingga Juli 2019 menembus angka 1 juta kunjungan, tepatnya 1.086.796 kunjungan. Dengan banyaknya gelandangan di Kota Batam sangat disayangkan karena memperburuk citra Kota Batam sebagai kota yang tertib dan bersih sesuai dengan visi Wali Kota Batam H.M Rudi yaitu “Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”

Di Kota Batam sendiri telah dibangun pada tahun 2009 gedung pusat rehabilitasi sosial Nilam Suri yang terletak di Jalan Hang Lekir, Nongsa, Batam dengan anggaran 7 miliar. Akan tetapi hal ini masih dinilai kurang efektif, karena permasalahan gelandangan dan pengemis tidak serta merta terselesaikan, masih banyak ditemukan gelandangan dan pengemis di Kota Batam bahkan yang telah di rehabilitasi pun sering dijumpai kembali melakukan kegiatan mengemis di jalanan padahal untuk tahun 2019 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah mengalokasikan 27 miliar untuk operasional kegiatan mereka.

Tabel 1.1 Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam Berdasarkan Data Dinas Sosial Tahun 2017-2019

Tahun	2017	2018	2019
Jumlah Gelandangan dan Pengemis	300	330	512

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Batam

Data dinas sosial Kota Batam menunjukkan pada tahun jumlah gelandangan dan pengemis yang berhasil ditangkap dan dibina" akan 2017 pengemis dan gelandangan yang tertangkap dan di rehabilitasi berjumlah 300 orang dan pada tahun 2018 dari Januari sampai Maret ada sekitar 330 orang tetapi dengan orang yang sama pada tahun sebelumnya, dan kemudian pada tahun 2019 meningkat jauh, telah terjaring 512 orang, dari sini dapat dilihat bahwa jumlah gelandangan dan pengemis setiap tahun semakin meningkat dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat maupun karena pendapatan dijalanan yang besar sehingga membuat gelandangan dan pengemis betah berada dijalanan.

Dalam menangani permasalahan ini Pemerintah Kota Batam juga mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam yaitu pada BAB II Pasal 3 ayat 1 yaitu :

Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun baik dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama di jalan-jalan, jalur hijau, taman, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Dari Perda diatas dapat kita ketahui bahwa kegiatan mengemis dilarang oleh Pemerintah. Akan tetapi masih banyak ditemukan banyak pengemis maupun gelandangan, terutama pada saat menjelang dan di bulan ramadhan. Demikian juga masyarakat masih banyak yang memberi uang kepada pengemis yang meminta-minta padahal sudah jelas hal itu dilarang oleh pemerintah Kota Batam. Alasan masyarakat memberi uang kepada pengemis adalah untuk bersedekah karena menurut masyarakat bahwa tangan diatas lebih baik dari pada tangan dibawah.

Dalam hal ini sesuai dengan peraturan walikota batam nomor 45 tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dimana penanganan dan pemberdayaan fakir miskin atau gelandangan dan pengemis adalah tugas dari Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat dimana dinas tersebut dibantu oleh polisi pamong praja atau satpol pp kota batam.

Rumusan Masalah

Bagaimana Peran Pemerintah Kota Batam Melalui Dinas Sosial Dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis pada tahun 2017-2019?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam melalui Dinas sosial dalam menertibkan Pengemis dan gelandangan.

II. Metode Penelitian

Penelitian peran Dinas Sosial menangani masalah gelandangan dan pengemis di Kota Batam menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (Moleong, 2007 p. 4) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan model wawancara mendalam dimana penulis menggali pertanyaan untuk di jawab oleh responden bila tidak ditemukan jawabannya maka penulis meminta rekomendasi dari responden siapa yang perlu di wawancarai lagi dan seterusnya.

2. Dokumentasi

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, skripsi, dan jurnal. Dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan-tulisan ilmiah.

3. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2004, p. 104). Menurut Sutrisno Hadi, Observasi ialah proses yang kompleks, terdiri dari berbagai macam proses biologis maupun proses psikologis. Namun, proses yang paling penting ialah ingatan dan pengamatan. Gibson dan Mitchell Observasi merupakan teknik untuk menyeleksi dalam penentuan keputusan dan konklusi terhadap orang lain yang diamati. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Observasi non Partisipan, karena dalam penelitian ini peneliti tidak terlibat langsung dalam pengimplementasian E-Government dalam pelayanan publik di Kepulauan Riau. Peneliti hanya melakukan pengamatan guna mengetahui kondisi objek yang diteliti.

III. Hasil dan Pembahasan

Peran Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di kota Batam sangat penting bagi pengembangan pariwisata serta meningkatkan kenyamanan bagi wisatawan lokal maupun internasional, karena adanya peran dan dukungan pemerintah dapat merumuskan kebijakan untuk di Kota Batam gelandangan dan pengemis. Ini semua bisa berjalan dikarenakan ada campur tangan pemerintah dalam hal ini dinas Sosial untuk mengatur, mengawasi, dan menindak lanjuti berbagai persoalan yang terjadi dan bisa mempercepat pergerakan dalam sektor ekonomi dan pariwisata dengan kebijakan yang disusun pemerintah kota Batam. Akan tetapi tidak hanya campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah saja, juga adanya proses masyarakat guna tidak memberikan bantuan kepada gelandangan dan pengemis yang berada di daerah Kota Batam.

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial, dari gambaran diatas prihal objek lokasi penelitian dimana dijelaskan gambaran umum kota batam beserta tata pemerintahan kota batam dan profil dinas sosial dan pemberdayaan kota batam sebagaimana dinas sosial dan pemberdayaan adalah yang bertanggung jawab kepada penataan, pembinaan dan pemberdayaan gelandangan dan pengemis sesuai dengan peraturan walikota nomor 45 tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat kota batam, sedangkan untuk aturan acuan yang digunakan oleh dinas disini adalah peraturan daerah nomor 6 tahun 2002 tentang ketertiban sosial.

Dalam penelitian kali ini untuk mendapatkan hasil penelitian objektif dan relafan peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dimana yang juga melibatkan dinas sosial dan

pemberdayaan masyarakat maupun gelandangan dan pengemis itu sendiri, dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara terhadap pihak dinas sosial yaitu bidang rehabilitasi tuna sosial dan panti rehabilitasi sosial beserta gelandangan dan pengemis, wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi-informasi yang akan di gunakan peneliti untuk mengolah atau menjadikan kesimpulan permasalahan gelandangan dan pengemis, kemudian selain wawancara peneliti juga melakukan observasi atau pengamatan secara langsung ke objek penelitian baik itu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat maupun gelandangan dan pengemis, dalam observasi peneliti terhadap Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat peneliti mendapatkan bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam telah bekerja dalam hal penanganan gelandangan dan pengemis seperti melakukan razia 2-3 kali dalam satu minggu bersama Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol-PP, kemudian juga melakukan pendataan kepada gelandangan dan pengemis yang terjaring razia dari data tersebut kemudian di dapatkan gelandangan dan pengemis yang akan dipulangkan ke daerah asalnya, keluarganya atau mendapatkan pembinaan serta pelatihan dipanti rehabilitasi sosial Nilam Suri.

Pembinaan gelandangan dan pengemis yang berada di Kota Batam tidak terlepas dari peran Dinas Sosial yang telah disepakati sampai turun langsung ke lapangan dalam bentuk berbagai kebijakan yang disusun pemerintah dan berbagai program yang dilaksanakan. Tetapi perlu diketahui bahwa disamping peran Dinas Sosial serta terdapat peran dari masyarakat juga gelandangan dan pengemis itu sendiri. Di bawah ini penulis akan paparkan beberapa peran Dinas Sosial Kota Batam yang penulis temukan dari lapangan yaitu :

1. Peran Pengaturan

Peran pengaturan di sini adalah segala bentuk regulasi yang mengatur dan merencanakan mengenai objek penelitian yang telah dilakukan. Adapun dasar regulasi yang mengatur segala bentuk kegiatan terkait dengan penanganan gelandangan dan pengemis di kota batam yaitu melalui perda nomor 6 tahun 2002 tentang ketertiban sosial di kota batam.

peraturan yang mengatur tentang gelandangan dan pengemis yang mencakup peran Dinas Sosial di dalamnya yaitu tertera dalam perda nomor 6 tahun 2002 Tentang ketertiban sosial dimana diantaranya terkait dengan penanganan gelandangan dan pengemis. Yang mana Dinas Sosial harus mengikuti peraturan yang telah di buat oleh pemerintah daerah. Kemudian dari pada itu undang-undang mengenai gelandangan pengemis tertera dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1.

untuk melakukan tindakan lapangan, Dinas Sosial Kota Batam menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol-PP Kota Batam untuk melakukan razia bagi gelandangan dan pengemis yang berada di jalanan, untuk razia yang dilakukan 2 sampai 3 kali dalam seminggu dengan adanya kerjasama Dinas Sosial dan Satpol-PP ini untuk menertibkan para gelandangan dan pengemis agar tidak melakukan aksi di jalanan dengan meminta-meminta juga di anggap merusak keindahan lingkungan daerah Kota Batam.

bahwa setelah terjaring razia para gelandangan dan pengemis akan di data serta di berikan pengarahan di Dinas Sosial Kota Batam, lalu kemudian di beri tindakan pembinaan bagi mereka agar para gelandangan dan pengemis yang terjaring razia ini setelah di berikan pembinaan tidak kembali ke jalanan dengan cara meminta-minta dan merusak keindahan lingkungan Kota Batam.

2. Peran Pemberdayaan

Peran pemberdayaan yang dimaksudkan ialah bagaimana Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menyusun sesuai dengan yang disebutkan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dimana penanganan dan Pemberdayaan fakir miskin atau gelandangan dan pengemis adalah tugas dari Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat dimana Dinas tersebut dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

upaya pemberdayaan yang di lakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam yaitu memberikan pembinaan adapun, pembinaan yang di berikan oleh Dinas Sosial yaitu berupa menjahit, salon dan las besi kepada gelandangan dan pengemis yang terjaring razia di Kota Batam yang mana pembinaan ini di berikan supaya para gelandangan dan pengemis ini memiliki keterampilan guna mendapatkan pekerjaan ataupun membuka lapangan kerja kedepannya dan tidak kembali ke lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa salah satu yang di lakukan oleh Dinas Sosial Kota Batam sebagai Peran Pemberdayaan Kota Batam yaitu dengan cara memberikan kegiatan-kegiatan kepada para gelandangan dan pengemis yang terjaring razia seperti ceramah, senam dll. Agar mereka memiliki pengetahuan-pengetahuan baru, akan tetapi kurangnya tingkat keamanan sehingga mudah untuk para warga binaan melarikan diri dari panti rehabilitasi, diberikan pelatihan-pelatihan serta sertifikat agar para gelandangan dan pengemis yang terjaring razia ini dapat bekerja sesuai dengan keterampilan yang di berikan oleh Dinas Sosial Kota Batam.

mengenai pembinaan faktor-faktor mengapa binaan tersebut diberikan karena ketiga hal tersebut paling memungkinkan menurut Dinas Sosial untuk memberikan keterampilan yang dapat berguna bagi wargabinaan untuk berguna di kemudian hari, sehingga mereka memiliki keterampilan dan tidak kembali ke jalanan sebagai gelandangan dan pengemis.

3. Peran Pelayanan

Peran Pelayanan merupakan segala bentuk pelayanan dari pemerintah ataupun instansi terkait kepada gelandangan dan Pengemis, baik itu melalui peraturan pemerintah ataupun penilaian langsung di lapangan sehingga dapat melakukan evaluasi dan menerapkan perbaikan pada kekurangan di kemudian hari.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa mengenai pengawasan terhadap warga binaan dilakukan secara baik, hanya saja pembinaannya kurang efektif karena para gelandangan dan pengemis yang pernah di razia oleh Satpol-PP setelah di bina, beberapa diantaranya ada yang balik ke jalanan untuk melakukan tindakan menggelandang dan mengemis bahkan beberapa dari mereka terjaring razia kembali.

warga binaan kembali ke jalanan karena pengaruh dari lingkungannya, dikarenakan adanya beberapa hambatan. Hambatan itu berupa sulitnya mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang mereka dapatkan pada saat kembali ke jalanan juga dengan pendidikan yang rendah menjadi sulit mendapatkan pekerjaan, juga keterbatasan modal yang mereka miliki untuk membuka usaha dan merealisasikan keahlian mereka pada masyarakat.

IV. Kesimpulan

Dalam penelitian peran dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat kota Batam dalam pembinaan gelandangan dan pengemis pada tahun 2017-2019 menunjukkan kalau dinas sosial dan pemberdayaan kota Batam sudah cukup berperan hanya saja masih banyak hambatan-hambatan di lapangan misalnya mindset masyarakat untuk memberi mereka yang hidup di jalanan dengan dalih

“tangan diatas lebih baik dari pada tangan di bawah” maupun rasa kasihan terhadap mereka, adapun hal ini dijadikan atau dimanfaatkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dan tidak bekerja karena mudah dan banyaknya yang di dapatkan dari penghasilan mengemis dijalanan, maupun kebijakan yang tak kunjung diperbaharui terkait penanganan gelandangan dan pengemis dan lain-lain, dengan demikian dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat di dorong untuk bekerja lebih keras dalam hal ini mengingat pentingnya permasalahan ini yang kerap dianggap sepele di masyarakat.

1. Pengaturan

Dasar Regulasi yang mengatur dan merencanakan mengenai objek penelitian yang telah dilakukan. Adapun dasar regulasi yang mengatur segala bentuk kegiatan terkait dengan penanganan gelandangan dan pengemis di kota batam yaitu melalui perda nomor 6 tahun 2002 tentang ketertiban sosial di kota batam.

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan sesuai yang disebutkan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 45 Tahun 2016 Tetang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dimana penanganan dan Pemberdayaan fakir miskin atau gelandangan dan pengemis adalah tugas dari Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat dimana Dinas tersebut dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

Dalam Dinas Sosial sendiri ada pembagian tugas dan bidang tersendiri, adapun bagian-bagian tersebut seperti bagian umum, bagian perencanaan program, bagian keuangan bidang perlindungan jaminan dan pemberdayaan sosial, bidang perlindungan sosial korban bencana dan beberapa bidang lainnya.

3. Pelayanan

Pelayanan merupakan segala bentuk pelayanan dari pemerintah ataupun instansi terkait, baik itu melalui peraturan pemerintah ataupun penilaian langsung di lapangan sehingga dapat melakukan evaluasi dan menerapkan perbaikan pada kekurangan di kemudian hari.

V. Daftar Referensi :

- Arikunto , suharsimi, 2013. prosedur penelitian suatu pendekatan praktek
Andi Prastowo. 2010. Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: DIVA Press
- Irawan, Dimas D. 2013. Pengemis Undercover. Jakarta: Titik Media Publisher
- Nugroho, Riant D. 2012. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. ALFABETA.
- Putra, Fadillah. 2003. Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Purwanto, Erwan dan Ratih Sulistyastuti, Dyah. 2012. Implementasi Kebijakan Publik : konsep dan Aplikasinya di Indonesia.Gava Media: Yogyakarta.
- Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono. 2012. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfa Beta
- Suparlan, Parsudi. 2008. Kemiskinan Di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan. Jakarta: Sinar Harapan Dan Yayasan Obor Indonesia
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005 Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : Citra Utama

- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Jakarta: PT. Buku Kita.
- Wijaya, Fefta, Andi, dkk. 2014, Empirical Study Praktek Inovasi Birokrasi Dalam Penanganan Permasalahan Gelandangan Di Kota Surabaya. Jurnal Ad' ministrare, Vol. 2 No. 2, Juli – Desember 2014
- Owen E. Hughes, Public Manajemen And Administration, An Introduction, London: Martin Press, 1994, hal 88-119
- Soekanto, Soerjono. 1985. Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat. Bandung: Alumni
- Suparlan, Parsudi. 2002. Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural. Jakarta: Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto Soerjono. 2007. Sosiologi suatu pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Halim & Damayanti, 2007. Manajemen Keuangan Daerah, Pengelola Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Ivancevich, John, M, dkk. 2008. Perilaku dan Manajemen Organisasi, jilid 1 dan 2 Jakarta : Erlangga
- Sekaran, Uma. 2011. Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis). Jakarta: Salemba Empat
- Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung

VI. Jurnal / Skripsi :

- Betha Dwidinanti Zefianningsih, Budhi Wibhawa, Hadiyanto A. Rachim (2016) Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Panti Sosial Bina Karya “ Pangudi Luhur” Bekasi
- Zulhaqiqi. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat (Studi Kasus Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram
- Putra, Sandhi Ade. (2018). Pengawasan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Serang. Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Stiani. (2016). Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Purwekerto. Skripsi, Universitas Jendral Soedirman